

Article history:

Submitted: 14-07-2026

Received: 14-07-2026

Revised: 14-07-2026

Accepted: 18-07-2026

Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020–2024

Rezal*, Yunus Sading, Edhi Taqwa, Muhammad Akbar, Yohan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako

*Corresponding Author: rezalreza160301@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah Daerah (BPD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020–2024, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk data panel yang mencakup 13 kabupaten/kota selama 5 tahun pengamatan sehingga diperoleh 65 observasi. Sampel ditentukan menggunakan metode sampel jenuh. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta lembaga terkait lainnya. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel melalui perangkat lunak EViews 12. Sebelum pemilihan model, dilakukan pengujian asumsi klasik, kemudian model terbaik ditentukan melalui Uji Chow dan Uji Hausman, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel Belanja Pemerintah Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi, namun secara parsial variabel Belanja Pemerintah Daerah berpengaruh positif sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan belanja pemerintah daerah dan peningkatan penyerapan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci : Belanja Pemerintah Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Regresi Data Panel, Provinsi Sulawesi Tengah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Local Government Expenditure (LGE) and the Open Unemployment Rate (OUR) on economic growth across regencies and cities in Central Sulawesi Province during the 2020–2024 period, examining both partial and simultaneous effects. A quantitative approach with a descriptive-associative design was employed. The study utilized secondary panel data covering 13 regencies/cities over a five-year observation period, resulting in 65 observations. The sample was determined using the saturated sampling method. Data were obtained from the Central Sulawesi Province Central Statistics Agency (CSA), the Directorate General of Fiscal Balance, and other relevant institutions. Analysis was conducted using panel data regression via EViews 12 software. Prior to model selection, classical assumption tests were performed; the optimal model was then determined through the Chow Test and Hausman Test and subsequently used as the basis for hypothesis testing. The results indicate that, simultaneously, Local Government Expenditure and the Open Unemployment Rate have a significant influence on economic growth; however, regarding partial effects, Local Government Expenditure has a positive impact, whereas the Open Unemployment Rate has a negative impact on economic growth in the regencies and cities of Central Sulawesi Province. These findings demonstrate that the effective management of local government expenditure and increased labor absorption are crucial factors in driving sustainable economic growth.

Keywords: Regional Government Expenditure, Open Unemployment Rate, Economic Growth, Panel Data Regression, Central Sulawesi Province.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai capaian pembangunan suatu daerah, karena menggambarkan peningkatan kemampuan produksi, kenaikan pendapatan masyarakat, serta kondisi kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh (Marcal et al., 2024). Pada tingkat global, proses pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 masih dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti tingginya angka pengangguran, melemahnya aktivitas investasi, serta adanya ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah.

Dalam upaya memperkuat perekonomian nasional, pemerintah daerah memegang peranan penting melalui kebijakan pengalokasian belanja daerah untuk mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan peluang kerja. Berdasarkan teori Keynes (2018), ekspansi pengeluaran pemerintah dapat memperbesar permintaan agregat yang selanjutnya berdampak pada peningkatan output, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian, keberhasilan kebijakan tersebut tidak terlepas dari kondisi tingkat pengangguran, sehingga keterkaitan antara Belanja Pemerintah Daerah (BPD), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan pertumbuhan ekonomi perlu dikaji berdasarkan bukti empiris.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada rentang waktu 2020–2024 memperlihatkan capaian yang cukup tinggi, walaupun tetap mengalami perubahan akibat proses pemulihan pascapandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang berada pada angka 4,86% di tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 15,17% pada tahun 2022, kemudian mengalami perlambatan menjadi 9,89% pada tahun 2024 (BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2025). Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami kenaikan awal dari 3,77% pada tahun 2020 menjadi 3,81% pada tahun 2021, tetapi selanjutnya menunjukkan tren penurunan hingga berada pada tingkat 2,95% selama periode 2023–2024, yang mencerminkan adanya peningkatan kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut (BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024).

Pada periode yang sama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan peningkatan terhadap pengalokasian belanja daerah sebagai upaya memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah menjadi salah satu instrumen strategis dalam menggerakkan aktivitas ekonomi, memperbaiki produktivitas, dan memperluas kesempatan kerja (Maulid et al., 2021). Meskipun demikian, peningkatan belanja daerah yang disertai dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) belum secara langsung mencerminkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa keterkaitan antara belanja pemerintah daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah masih memerlukan pengujian empiris yang lebih mendalam.

Kajian empiris menunjukkan bahwa pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi masih menghasilkan temuan yang beragam. Penelitian Amri (2020) menemukan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana belanja barang dan jasa serta belanja hibah atau sosial memberikan pengaruh positif signifikan, sedangkan belanja modal menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Selanjutnya, penelitian Purwanti & Nurhidayati (2025) membuktikan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif sehingga peningkatan pengeluaran daerah berkaitan dengan peningkatan kinerja ekonomi wilayah. Sementara itu, penelitian Lestari (2025) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh komposisi belanja, efektivitas pengelolaan anggaran, serta karakteristik ekonomi masing-masing daerah.

Selain belanja pemerintah daerah, tingkat pengangguran terbuka juga merupakan faktor yang banyak dikaji dalam menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi. Penelitian Zahra (2023) menemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2003–2022. Hasil serupa diperoleh pada penelitian Mahtura & Ichsan (2026) yang menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebaliknya, penelitian Pratiwi (2022) membuktikan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Variasi hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja, struktur perekonomian, serta produktivitas tenaga kerja pada masing-masing wilayah.

Penelitian yang mengkaji keterkaitan antara kebijakan fiskal, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi secara serempak masih relatif terbatas. Penelitian Syakur et al (2022) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sebagai instrumen kebijakan fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Selanjutnya, penelitian Hanipah et al (2023) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sisi lain, penelitian Mahtura & Ichsan (2026) tetap menemukan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya belanja pemerintah, tetapi juga oleh kondisi pasar tenaga kerja yang menentukan efektivitas kebijakan fiskal dalam meningkatkan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian terdahulu, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, penelitian mengenai pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan hasil yang belum konsisten, di mana sebagian penelitian menemukan pengaruh positif signifikan, sedangkan penelitian lainnya memperoleh pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Kedua, penelitian mengenai pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi juga memperlihatkan perbedaan temuan, sehingga hubungan antara kedua variabel tersebut masih memerlukan pengujian empiris pada karakteristik wilayah yang berbeda. Ketiga, sebagian besar penelitian terdahulu hanya menguji pengaruh belanja pemerintah daerah atau tingkat pengangguran secara terpisah, sedangkan penelitian yang mengintegrasikan kedua variabel tersebut dalam satu model empiris masih relatif terbatas.

Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji hubungan tersebut pada Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020–2024, yaitu masa yang mencakup pandemi Covid-19 hingga fase pemulihan ekonomi. Kondisi tersebut menjadi penting untuk diteliti mengingat Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan belanja daerah, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, sehingga hubungan di antara ketiga indikator tersebut perlu dibuktikan secara empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020–2024.

Tinjauan Pustaka

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai suatu proses meningkatnya kemampuan produksi suatu daerah yang ditunjukkan melalui peningkatan output riil dalam periode jangka panjang. Indikator yang sering digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, karena ukuran tersebut mampu menggambarkan perkembangan kapasitas produksi serta aktivitas ekonomi wilayah dari waktu ke waktu (Fahrudin, 2024).

Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi dijelaskan melalui berbagai perspektif teori, seperti teori klasik, neoklasik, endogen, dan Keynesian, yang secara umum menjelaskan bahwa akumulasi modal, ketersediaan tenaga kerja, perkembangan teknologi, serta intervensi pemerintah menjadi unsur penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Astuti et al., 2025). Dalam teori neoklasik Solow (1956), pertumbuhan ekonomi jangka panjang dipengaruhi oleh proses akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Dalam konteks penelitian ini, belanja pemerintah daerah dipandang sebagai salah satu bentuk akumulasi modal publik yang mendukung pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan peningkatan produktivitas ekonomi, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka mencerminkan tingkat pemanfaatan faktor tenaga kerja dalam proses produksi. Berdasarkan teori pertumbuhan neoklasik, akumulasi modal dan pemanfaatan tenaga kerja merupakan dua faktor utama yang menentukan peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kedua variabel tersebut menjadi faktor yang relevan dalam menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah.

Sementara itu, teori pertumbuhan endogen yang diperkenalkan Romer (1994) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor dari luar sistem ekonomi, tetapi juga berasal dari investasi pada modal manusia, pembangunan infrastruktur, inovasi, serta kebijakan pemerintah yang mampu meningkatkan produktivitas (Chirwa & Odhiambo, 2018). Berdasarkan pendekatan tersebut, pengeluaran pemerintah daerah yang diarahkan pada kegiatan produktif, terutama pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan publik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, berpotensi memperkuat produktivitas ekonomi serta menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selanjutnya, Keynes menjelaskan bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat memperbesar permintaan agregat yang kemudian mendorong peningkatan produksi, pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja. Mekanisme ini memungkinkan perekonomian tumbuh lebih cepat, khususnya ketika kontribusi sektor swasta belum mampu mencapai tingkat optimal (Mankiw, 2022). Peningkatan kegiatan ekonomi tersebut juga dapat memberikan dampak lanjutan terhadap perluasan kesempatan kerja sehingga berpotensi menekan tingkat pengangguran dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, teori-teori tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari pengaruh faktor fiskal dan ketenagakerjaan, sehingga menjadi dasar yang relevan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan laju pertumbuhan PDRB riil Provinsi Sulawesi Tengah sebagai indikator yang mencerminkan perubahan aktivitas ekonomi daerah selama periode penelitian.

Belanja Pemerintah Daerah

Belanja pemerintah daerah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang berperan sebagai instrumen pemerintah dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat daerah. Secara umum, belanja pemerintah daerah mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta penyediaan pelayanan publik. Belanja daerah juga dipahami sebagai seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam suatu periode anggaran dan dialokasikan untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Nasution, 2019). Dalam pelaksanaannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya, mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah melalui berbagai jenis pengeluaran (Mardiasmo, 2021).

Belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam perekonomian. Belanja operasi digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, belanja modal diarahkan pada penyediaan aset tetap seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang memberikan manfaat jangka panjang, sedangkan belanja transfer bertujuan mendukung pemerataan fiskal dan membantu pemerintah daerah atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Halim, 2002). Di antara ketiga jenis belanja tersebut, belanja modal umumnya dipandang sebagai belanja yang paling produktif karena menghasilkan aset publik yang mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki infrastruktur, menarik investasi, dan memberikan dampak berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Mahmudi, 2019).

Dalam perspektif *Wagner's Law*, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik sehingga mendorong kenaikan pengeluaran pemerintah. Seiring berkembangnya perekonomian, pemerintah dituntut menyediakan infrastruktur, layanan pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai fasilitas publik lainnya untuk mendukung aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu memperkuat pembangunan ekonomi melalui penyediaan barang dan jasa publik (Sari et al, 2024).

Dalam pendekatan Keynesian, peningkatan belanja pemerintah merupakan bentuk kebijakan fiskal ekspansif yang secara langsung meningkatkan komponen pengeluaran pemerintah dalam permintaan agregat (*aggregate demand*) sehingga mendorong kenaikan permintaan barang dan jasa di dalam perekonomian (Mankiw, 2022). Meningkatnya permintaan agregat mendorong perusahaan meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kondisi tersebut diikuti oleh

peningkatan penggunaan faktor produksi, terutama tenaga kerja, sehingga kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat (Blanchard, 2024). Peningkatan pendapatan kemudian mendorong konsumsi rumah tangga yang kembali meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa melalui mekanisme multiplier effect. Proses tersebut menyebabkan output perekonomian terus meningkat sehingga pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2022)

Konsep *multiplier effect* menjelaskan bahwa setiap tambahan pengeluaran pemerintah tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi, tetapi juga menimbulkan efek lanjutan berupa peningkatan pendapatan masyarakat, konsumsi, investasi, serta permintaan terhadap barang dan jasa. Dampak berantai tersebut menghasilkan kenaikan output ekonomi yang lebih besar dibandingkan nilai awal pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, efektivitas belanja pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor produktif yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan (Andani et al., 2025).

Selanjutnya, teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*) menjelaskan bahwa belanja pemerintah yang dialokasikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur merupakan investasi publik yang mampu meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Stiglitz & Rosengard, 2015). Belanja pada sektor pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas inovasi tenaga kerja, sedangkan belanja kesehatan meningkatkan kualitas modal manusia dengan memperbaiki kondisi kesehatan, produktivitas, dan efektivitas kerja masyarakat (Blanchard, 2024). Di sisi lain, belanja infrastruktur menyediakan sarana transportasi, energi, komunikasi, dan fasilitas publik yang menurunkan biaya produksi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi sehingga produktivitas sektor swasta ikut meningkat (Mankiw, 2022). Dengan demikian, belanja pemerintah yang diarahkan pada sektor-sektor produktif tidak hanya meningkatkan permintaan agregat dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat kapasitas produksi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Penelitian Solihin (2018) menyebutkan bahwa berdasarkan *Wagner's Law*, teori Keynes, konsep *multiplier effect*, dan teori pertumbuhan endogen, belanja pemerintah daerah diperkirakan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja pemerintah yang dialokasikan secara efektif pada sektor-sektor produktif mampu meningkatkan permintaan agregat, memperluas kesempatan kerja, memperkuat produktivitas, serta meningkatkan kapasitas produksi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini mengasumsikan bahwa Belanja Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran menjadi salah satu ukuran penting dalam menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja suatu daerah, khususnya dalam melihat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan kebutuhan tenaga kerja. Pengangguran terjadi ketika seseorang yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan, tetapi masih berupaya secara aktif untuk mendapatkan pekerjaan (Putri & Rusdi, 2025). Dalam analisis ketenagakerjaan, fenomena tersebut diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu rasio antara jumlah pengangguran dengan total angkatan kerja pada suatu wilayah. Berdasarkan pandangan Keynesian, pengangguran muncul sebagai konsekuensi dari melemahnya permintaan agregat dalam perekonomian. Penurunan permintaan barang dan jasa menyebabkan perusahaan mengurangi kapasitas produksi sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja ikut menurun dan jumlah pengangguran meningkat (Keynes, 2018).

Menurut konsep produktivitas tenaga kerja, produktivitas merupakan jumlah output yang dapat dihasilkan oleh setiap tenaga kerja dalam suatu periode tertentu, sehingga peningkatan produktivitas menjadi faktor utama yang menentukan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Krugman & Wells, 2013). Dalam konteks Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), semakin banyak tenaga kerja yang menganggur maka semakin sedikit tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi sehingga kapasitas produksi menurun, output barang dan jasa berkurang, PDRB mengalami penurunan, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah (Todaro & Smith, 2021). Dengan demikian, pengangguran tidak hanya mencerminkan masalah ketenagakerjaan,

tetapi juga menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan faktor produksi tenaga kerja dalam menghasilkan output ekonomi.

Kondisi tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut melalui *Human Capital Theory* yang dikemukakan Schultz (1971) dan dikembangkan Becker (1993) menjelaskan bahwa pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan kesehatan merupakan bentuk modal manusia (*human capital*) yang berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Apabila tenaga kerja berada dalam kondisi menganggur, modal manusia yang dimiliki tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga produktivitas menurun, output ekonomi berkurang, dan kemampuan perekonomian untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi menjadi terhambat (Becker, 1993). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar pula potensi sumber daya manusia yang tidak termanfaatkan dalam kegiatan produksi.

Secara makroekonomi, hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dijelaskan melalui *Okun's Law* yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan pengangguran akan menyebabkan penurunan pertumbuhan output atau PDRB (Okun, 1962). Hubungan tersebut menunjukkan bahwa sebagian tenaga kerja produktif tidak terserap dalam proses produksi sehingga kapasitas output berada di bawah tingkat optimal. Tingginya pengangguran juga mengurangi pendapatan masyarakat, melemahkan konsumsi rumah tangga, serta menurunkan permintaan agregat yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka mencerminkan meningkatnya pemanfaatan tenaga kerja, produktivitas, dan kapasitas produksi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pendekatan Keynesian, konsep produktivitas tenaga kerja, *Human Capital Theory*, dan *Okun's Law*, penelitian ini mengasumsikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah pemanfaatan tenaga kerja produktif dalam proses produksi sehingga output dan pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. Sebaliknya, penurunan tingkat pengangguran menunjukkan meningkatnya penggunaan modal manusia dan kapasitas produksi yang pada akhirnya mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Pengembang Hipotesis

Hubungan Belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja pemerintah daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, dan pembangunan daerah (Ridwan & Nawir, 2021). Menurut Amalia (2021), peningkatan belanja pemerintah yang diarahkan pada sektor-sektor produktif mampu meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja pemerintah yang dialokasikan pada fungsi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan juga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat (Safitri et al., 2021). Selain itu, belanja daerah yang efektif dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi regional (Simanjuntak et al., 2025).

Secara empiris, pengeluaran pemerintah memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan permintaan agregat (Ridwan & Nawir, 2021). Amalia (2021) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dibiayai pemerintah mampu meningkatkan produktivitas berbagai sektor ekonomi, penelitian Safitri et al. (2021) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas belanja daerah berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa belanja pemerintah yang dialokasikan secara produktif dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hubungan Tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan besarnya angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan sehingga menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi (Amalia, 2021). Penelitian Darmawan & Mifrahi (2022), meningkatnya pengangguran menyebabkan pemanfaatan faktor produksi tenaga kerja menjadi tidak optimal sehingga kapasitas produksi daerah

menurun. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Amalia, 2021). Himmah et al (2024) juga menjelaskan bahwa tingginya tingkat pengangguran dapat menurunkan produktivitas masyarakat serta memperlambat perkembangan ekonomi wilayah.

Sisi empiris, pengangguran juga menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat sehingga daya beli ikut melemah (Ridwan & Nawir, 2021). Darmawan & Mifrahi (2022) menyatakan bahwa menurunnya konsumsi rumah tangga akan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa sehingga aktivitas ekonomi menjadi lebih lambat. Hasil penelitian Safitri et al (2021) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena menghambat peningkatan output daerah. Berdasarkan uraian tersebut, semakin tinggi Tingkat Pengangguran Terbuka maka pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hubungan Belanja pemerintah daerah dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kebijakan fiskal pemerintah dan kondisi pasar tenaga kerja (Amalia, 2021). Belanja pemerintah yang produktif dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui pembangunan berbagai fasilitas publik, memperkuat investasi, serta mendorong peningkatan output daerah (Ridwan & Nawir, 2021). Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut juga menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang tinggi mengurangi produktivitas tenaga kerja, menyebabkan kapasitas produksi tidak dimanfaatkan secara optimal, dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Darmawan & Mifrahi, 2022). Dengan demikian, belanja pemerintah daerah dan tingkat pengangguran terbuka merupakan dua faktor yang saling melengkapi dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena efektivitas kebijakan fiskal akan memberikan hasil yang lebih optimal apabila diikuti oleh pemanfaatan tenaga kerja yang lebih produktif.

Berbagai penelitian telah mendukung hubungan tersebut. Safitri et al. (2021) menyatakan bahwa peningkatan kualitas belanja pemerintah yang disertai penurunan tingkat pengangguran mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Himmah et al. (2024) membuktikan bahwa belanja daerah dan tingkat pengangguran secara serempak memengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah. (Simanjuntak et al., 2025) juga menjelaskan bahwa efektivitas belanja pemerintah akan memberikan hasil yang lebih optimal apabila didukung oleh kondisi tenaga kerja yang produktif. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah yang diikuti oleh rendahnya tingkat pengangguran mampu memperkuat kapasitas produksi, meningkatkan output daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih berkelanjutan dibandingkan apabila kedua faktor tersebut bekerja secara terpisah. Berdasarkan landasan teoritis dan hasil penelitian terdahulu tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Belanja pemerintah daerah dan tingkat pengangguran terbuka secara serempak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif-asosiatif yang digunakan untuk menguji pengaruh Belanja Pemerintah Daerah (BPD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap pertumbuhan ekonomi pada 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu 2020–2024. Data penelitian berupa data sekunder dalam bentuk data panel yang mengintegrasikan data *cross section* dan *time series*, sehingga menghasilkan total 65 observasi. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), serta berbagai lembaga terkait lainnya. Populasi penelitian meliputi seluruh kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan penentuan sampel menggunakan metode sampel jenuh (*census sampling*), sehingga seluruh populasi digunakan sebagai sampel penelitian.

Tabel 1
Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Satuan	Skala	Sumber Data
1	Pertumbuhan Ekonomi (PE) (Y)	Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada masing-masing Kabupaten/kota.	Laju pertumbuhan PDRB ADHK	Persen (%)	Rasio	BPS Provinsi Sulawesi Tengah
2	Belanja Pemerintah Daerah (BPD) (X ₁)	Total realisasi belanja pemerintah daerah pada masing-masing kabupaten/kota.	Total realisasi belanja daerah	Rupiah (Rp)	Rasio	DJPK Kementerian Keuangan dan BPS
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X ₂)	Persentase pengangguran terhadap total angkatan kerja pada masing-masing kabupaten/kota.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	Rasio	BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber: data olahan

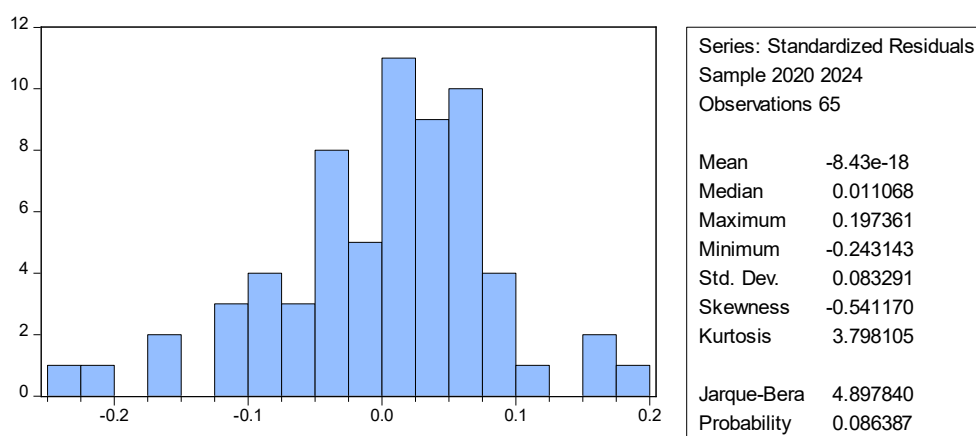
Pengolahan data dilakukan melalui analisis statistik deskriptif dan regresi data panel dengan menggunakan perangkat lunak EViews 12. Pemilihan model estimasi terbaik dilakukan melalui Uji Chow dan Uji Hausman untuk menentukan model yang paling tepat di antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat diuji menggunakan persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = \alpha_i + \beta_1 BPD_{it} - \beta_2 TPT_{it} + \varepsilon_{it}$$

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Tahap selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis melalui uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial, uji F untuk melihat pengaruh variabel secara serempak, serta koefisien determinasi (Adjusted R²) untuk mengetahui tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi.

HASIL

Gambar 1 menjelaskan hasil uji normalitas yang ditunjukkan pada Gambar 1 memperlihatkan nilai Jarque-Bera sebesar 4,897840 dengan probabilitas 0,086387. Karena nilai probabilitas tersebut lebih tinggi dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual model memenuhi asumsi berdistribusi normal. Terpenuhinya asumsi ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan telah layak untuk dilanjutkan dalam proses pengujian hipotesis.



Sumber: data olahan

Gambar 1
Diagram Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.430696	0.341281	-1.261999	0.2128
BPD	0.069058	0.047803	1.444636	0.1548
TPT	0.046223	0.030203	1.530400	0.1322

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel menunjukkan nilai probabilitas yang melebihi 0,05, sehingga tidak ditemukan indikasi adanya heteroskedastisitas dalam model. Hasil ini mengindikasikan bahwa asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi, sehingga model dinyatakan layak untuk digunakan pada analisis tahap selanjutnya. Sedangkan Tabel 3, hasil pengujian multikolinearitas memperlihatkan nilai korelasi antara Belanja Pemerintah Daerah (BPD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,053467, yang berada jauh di bawah ambang batas umum 0,80. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan linear antarvariabel independen tergolong sangat lemah, sehingga model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	BPD	TPT
BPD	1.000000	0.053467
TPT	0.053467	1.000000

Sumber: data olahan

Setelah model dinyatakan memenuhi asumsi dasar analisis, langkah berikutnya adalah menentukan model regresi data panel yang paling sesuai. Pemilihan model dilakukan melalui Uji Chow untuk membandingkan Common Effect Model (CEM) dengan Fixed Effect Model (FEM), kemudian dilanjutkan dengan Uji Hausman untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Model yang terpilih selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengujian hipotesis dan interpretasi hasil penelitian.

Tabel 4
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	166.434560	(12,50)	0.0000
Cross-section Chi-square	241.293811	12	0.0000

Sumber: data olahan

Hasil Uji Chow pada Tabel 4 menunjukkan nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol ditolak sehingga Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan Common Effect Model (CEM). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik tetap antar kabupaten/kota yang perlu diperhitungkan dalam model regresi data panel. Hasil Uji Hausman pada Tabel 5 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0002 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, *Fixed Effect Model* (FEM) dipilih sebagai model terbaik dibandingkan Random Effect Model (REM). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik spesifik masing-masing kabupaten/kota berkorelasi dengan variabel independen sehingga pendekatan efek tetap lebih sesuai digunakan. Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model (FEM) sebagai model utama dalam mengestimasi pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 5
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.486432	2	0.0002

Sumber: data olahan

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, *Fixed Effect Model* (FEM) ditetapkan sebagai model regresi data panel yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan model tersebut menunjukkan bahwa terdapat karakteristik spesifik pada masing-masing kabupaten/kota yang berkorelasi dengan variabel independen sehingga pendekatan efek tetap lebih mampu menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi dibandingkan model lainnya. Oleh karena itu, seluruh pengujian hipotesis dan interpretasi hasil penelitian selanjutnya didasarkan pada hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 6
Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.187146	0.713177	7.273296	0.0000
BPD	0.536029	0.099895	5.365923	0.0000
TPT	-0.256711	0.063116	-4.067288	0.0002
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.991880	Mean dependent var	8.999267	
Adjusted R-squared	0.989606	S.D. dependent var	0.924299	
S.E. of regression	0.094233	Akaike info criterion	-1.686921	
Sum squared resid	0.443992	Schwarz criterion	-1.185139	
Log likelihood	69.82492	Hannan-Quinn criter.	-1.488936	
F-statistic	436.2453	Durbin-Watson stat	1.381244	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: data olahan

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 6 diperoleh persamaan regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai berikut:

$$Y = 5,187146 + 0,536029BPD_{it} - 0,256711TPT_{it} + \varepsilon_{it}$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan hubungan antara Belanja Pemerintah Daerah (BPD), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020–2024. Interpretasi masing-masing koefisien regresi dijelaskan sebagai berikut:

Nilai konstanta sebesar 5,187146 menunjukkan bahwa apabila Belanja Pemerintah Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka diasumsikan tetap (*ceteris paribus*), maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,187146 persen. Koefisien regresi Belanja Pemerintah Daerah (BPD) sebesar 0,536029 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Belanja Pemerintah Daerah sebesar 1 persen diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,536029 persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien regresi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar -0,256711 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1 persen diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,256711 persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Belanja Pemerintah Daerah memiliki nilai t-statistic sebesar 5,365923 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima. Sementara itu, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki nilai t-statistic sebesar -4,067288 dengan probabilitas sebesar 0,0002. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima.

Hasil pengujian serentak menunjukkan nilai F-statistic sebesar 436,2453 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Pemerintah Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020–2024.

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,989606 menunjukkan bahwa sebesar 98,96% variasi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020–2024 dapat dijelaskan oleh variasi Belanja Pemerintah Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka dalam model penelitian. Sementara itu, sebesar 1,04% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Tabel 7
Nilai Fixed Effect Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Nilai Fixed Effect
Banggai	0.604414
Banggai Kepulauan	-0.970854
Banggai Laut	-1.129191
Buol	-0.465482
Donggala	0.046020
Kota Palu	0.755434
Morowali	2.037532
Morowali Utara	0.387365
Parigi Moutong	0.171194
Poso	-0.340710
Sigi	-0.242447
Tojo Una-Una	-0.646298
Tolitoli	-0.206977

Sumber: data olahan

Tabel 7 menyajikan nilai efek tetap (*fixed effect*) masing-masing kabupaten/kota yang diperoleh dari hasil estimasi *Fixed Effect Model* (FEM). Nilai efek tetap tersebut menunjukkan adanya perbedaan karakteristik yang bersifat tetap (*time-invariant*) pada setiap kabupaten/kota yang tidak dapat dijelaskan secara langsung oleh variabel Belanja Pemerintah Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Kabupaten Morowali memiliki nilai efek tetap tertinggi sebesar 2,037532. Selain itu, Kota Palu (0,755434), Kabupaten Banggai (0,604414), Morowali Utara (0,387365), Parigi Moutong (0,171194), dan Donggala (0,046020) juga menunjukkan nilai efek tetap positif. Sebaliknya, beberapa kabupaten memiliki nilai efek tetap negatif, yaitu Banggai Kepulauan (−0,970854), Buol (−0,465482), Poso (−0,340710), Sigi (−0,242447), Tolitoli (−0,206977), Tojo Una-Una (−0,646298), dengan Kabupaten Banggai Laut memiliki nilai efek tetap terendah sebesar −1,129191.

Perbedaan nilai efek tetap tersebut menunjukkan bahwa setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik spesifik yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian di luar pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Hasil ini sekaligus mendukung pemilihan Fixed Effect Model sebagai model terbaik berdasarkan Uji Chow dan Uji Hausman karena mampu mengakomodasi heterogenitas antarwilayah dalam analisis regresi data panel.

Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM), Belanja Pemerintah Daerah (BPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020–2024. Hasil tersebut ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,536029 dengan nilai t-statistic sebesar 5,365923 dan probabilitas sebesar 0,0000 (<0,05), sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan Belanja Pemerintah Daerah diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi. Secara empiris, setiap kenaikan Belanja Pemerintah Daerah sebesar 1 persen diperkirakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,536029 persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Belanja Pemerintah Daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi karena pengeluaran pemerintah meningkatkan aktivitas ekonomi melalui penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan yang mendukung peningkatan kapasitas produksi daerah. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut mendorong dunia

usaha memperluas produksi dan meningkatkan kebutuhan terhadap faktor produksi, terutama tenaga kerja, sehingga pendapatan masyarakat ikut meningkat dan konsumsi rumah tangga bertambah. Kondisi tersebut memperkuat permintaan agregat dan menghasilkan peningkatan output ekonomi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Mekanisme ini sesuai dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa belanja pemerintah merupakan instrumen kebijakan fiskal ekspansif yang mampu meningkatkan permintaan agregat (*aggregate demand*) sehingga mendorong peningkatan output perekonomian (Mankiw, 2022).

Peningkatan permintaan agregat mendorong dunia usaha meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga penggunaan faktor produksi, terutama tenaga kerja, ikut meningkat (Blanchard, 2024). Peningkatan kesempatan kerja kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat yang selanjutnya memperbesar konsumsi rumah tangga melalui mekanisme multiplier effect. Proses tersebut menghasilkan peningkatan output ekonomi yang lebih besar dibandingkan nilai awal pengeluaran pemerintah sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2022). Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung teori pertumbuhan endogen yang menjelaskan bahwa belanja pemerintah yang diarahkan pada sektor-sektor produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, merupakan investasi publik yang mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat kapasitas produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Stiglitz & Rosengard, 2015). Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Belanja Pemerintah Daerah tidak hanya meningkatkan permintaan agregat dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat produktivitas dan kapasitas produksi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amri (2020) yang menemukan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama melalui belanja barang dan jasa serta belanja hibah atau sosial yang berpengaruh positif signifikan. Temuan ini juga mendukung penelitian Purwanti & Nurhidayati (2025) yang membuktikan bahwa Belanja Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif sehingga peningkatan pengeluaran pemerintah daerah mampu meningkatkan kinerja ekonomi wilayah. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Lestari (2025) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh variasi karakteristik ekonomi daerah, komposisi alokasi belanja pemerintah, efektivitas pengelolaan anggaran, serta perbedaan periode pengamatan dan cakupan wilayah penelitian.

Pada konteks Provinsi Sulawesi Tengah, pengaruh positif Belanja Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi selama periode penelitian. Alokasi belanja pemerintah yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan berpotensi meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkan produktivitas ekonomi daerah. Kondisi tersebut selaras dengan teori pertumbuhan neoklasik Solow yang menempatkan akumulasi modal publik sebagai salah satu faktor yang meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat teori pertumbuhan endogen yang menekankan pentingnya investasi pemerintah dalam meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa efektivitas Belanja Pemerintah Daerah menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020–2024. Hasil tersebut ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar $-0,256711$ dengan nilai *t*-statistic sebesar $-4,067288$ dan probabilitas sebesar $0,0002$ ($<0,05$), sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka diikuti oleh penurunan pertumbuhan ekonomi. Secara empiris, setiap kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1 persen diperkirakan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar $0,256711$ persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi karena semakin banyak tenaga kerja yang tidak terserap ke dalam proses produksi sehingga kapasitas produksi daerah tidak dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut mengakibatkan output barang dan jasa menurun, pendapatan masyarakat berkurang, daya beli melemah, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Mekanisme tersebut sejalan dengan konsep produktivitas tenaga kerja yang menyatakan bahwa produktivitas merupakan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output sehingga menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi (Krugman & Wells, 2013). Semakin tinggi Tingkat Pengangguran Terbuka, semakin banyak tenaga kerja yang tidak terlibat dalam proses produksi sehingga pemanfaatan faktor tenaga kerja menjadi tidak optimal. Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas produksi menurun, output barang dan jasa berkurang, serta pertumbuhan ekonomi melambat (Todaro & Smith, 2021).

Hasil penelitian ini juga mendukung Human Capital Theory yang dikemukakan oleh Schultz dan dikembangkan oleh Becker, yang menjelaskan bahwa pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan kesehatan merupakan bentuk modal manusia yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja (Becker, 1993; Schultz, 1971). Ketika tenaga kerja menganggur, modal manusia yang dimiliki tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga produktivitas dan output ekonomi menurun. Penurunan produktivitas tenaga kerja tersebut menyebabkan penurunan output regional yang tercermin pada melambatnya pertumbuhan PDRB riil sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, hasil penelitian ini konsisten dengan Okun's Law yang menyatakan bahwa peningkatan tingkat pengangguran akan diikuti oleh penurunan output dan pertumbuhan ekonomi karena sebagian tenaga kerja produktif tidak terserap dalam kegiatan produksi (Okun, 1962). Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka tidak hanya mengurangi jumlah tenaga kerja yang bekerja, tetapi juga menghambat pemanfaatan modal manusia, menurunkan produktivitas, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratiwi (2022) yang membuktikan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pengangguran cenderung menurunkan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan output. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Zahra (2023); Mahtura & Ichsan (2026) yang menemukan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perbedaan hasil tersebut diduga dipengaruhi oleh karakteristik pasar tenaga kerja, struktur perekonomian daerah, tingkat produktivitas tenaga kerja, serta perbedaan periode pengamatan dan cakupan wilayah penelitian. Selain itu, tingkat efektivitas penyerapan tenaga kerja pada masing-masing daerah juga dapat memengaruhi besarnya kontribusi pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada konteks Provinsi Sulawesi Tengah, pengaruh negatif Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kerja masih menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan output daerah. Kabupaten/kota yang mampu menciptakan kesempatan kerja lebih besar cenderung memiliki kapasitas produksi yang lebih tinggi karena lebih banyak tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Sebaliknya, meningkatnya jumlah pengangguran menyebabkan sebagian modal manusia tidak termanfaatkan secara optimal sehingga mengurangi produktivitas, pendapatan masyarakat, dan kapasitas produksi daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah tidak hanya bergantung pada peningkatan investasi dan belanja pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan kebijakan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan vokasional, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja agar pemanfaatan modal manusia semakin optimal dan produktivitas tenaga kerja meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara Serempak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM), Belanja Pemerintah Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara Serempak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020–2024. Hasil tersebut ditunjukkan oleh nilai F-statistic sebesar 436,2453 dengan probabilitas sebesar 0,0000 ($<0,05$), sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Selain itu, nilai Adjusted R-squared sebesar 0,989606 menunjukkan bahwa sebesar 98,96% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh Belanja Pemerintah Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka, sedangkan sisanya sebesar 1,04% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki kontribusi yang kuat dalam menjelaskan perubahan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung pendekatan Keynesian yang menempatkan belanja pemerintah sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong permintaan agregat melalui peningkatan pengeluaran pemerintah (Mankiw, 2022). Peningkatan permintaan agregat mendorong aktivitas produksi, meningkatkan penggunaan tenaga kerja, serta memperbesar pendapatan masyarakat yang selanjutnya memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme *multiplier effect*. Selain mendukung teori Keynes, hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori pertumbuhan neoklasik Solow yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal dan pemanfaatan tenaga kerja. Dalam penelitian ini, Belanja Pemerintah Daerah mencerminkan akumulasi modal publik, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka mencerminkan tingkat pemanfaatan faktor tenaga kerja sehingga kedua variabel tersebut secara bersama-sama menentukan pertumbuhan ekonomi. Namun, efektivitas kebijakan fiskal tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka yang rendah memungkinkan peningkatan permintaan agregat direspons oleh dunia usaha melalui penyerapan tenaga kerja yang lebih besar sehingga kapasitas produksi meningkat. Sebaliknya, apabila tingkat pengangguran tetap tinggi, sebagian modal manusia tidak termanfaatkan secara optimal sehingga dampak positif belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kurang maksimal. Dengan demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada besarnya alokasi belanja pemerintah, tetapi juga pada kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja secara produktif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syakur et al (2022) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sebagai instrumen kebijakan fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan pengangguran berperan sebagai variabel yang memengaruhi hubungan tersebut. Temuan ini juga mendukung penelitian Hanipah et al (2023) yang membuktikan bahwa kebijakan fiskal pemerintah memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa keberhasilan kebijakan fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah, tetapi juga oleh kondisi pasar tenaga kerja yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dalam kegiatan produksi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah Daerah (BPD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020–2024. Hasil analisis menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, secara serempak Belanja Pemerintah Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan kemampuan model menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi sebesar 98,96%. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas belanja pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan peningkatan pengangguran terbuka justru menghambat pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kualitas dan efektivitas alokasi belanja, terutama pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi daerah agar mampu menciptakan efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memperkuat kebijakan penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan vokasional, pengembangan kompetensi tenaga kerja, serta perluasan investasi yang berorientasi pada

penyerapan tenaga kerja. Sinergi antara kebijakan fiskal daerah dan kebijakan ketenagakerjaan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu Belanja Pemerintah Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka, sehingga masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti investasi, inflasi, indeks pembangunan manusia, kualitas infrastruktur, dan tingkat kemiskinan. Kedua, cakupan penelitian terbatas pada 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020–2024 sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk wilayah lain dengan karakteristik ekonomi yang berbeda.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan periode pengamatan serta menambahkan variabel-variabel makroekonomi lain yang relevan agar mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengembangkan model analisis dengan memasukkan variabel mediasi atau moderasi, sehingga mekanisme hubungan antara kebijakan fiskal daerah, kondisi pasar tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F., 2021. *Ekonomi Pembangunan*. Widina Bhakti Persada.
- Amri, K., 2020. Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Bukti Data Panel di Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8(1), 1–18. DOI: [10.24952/masharif.v8i1.2585](https://doi.org/10.24952/masharif.v8i1.2585)
- Andani, N. M., Lutfi, M., Taqwa, E., Yunus, R., Musdayati, 2025. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. *Akuntansi* 45, 6(2), 726–737. DOI: [10.30640/akuntansi45.v6i2.5478](https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v6i2.5478)
- Astuti, A. W., Hasibuan, Z. H., Harefa, W. N. S. Br., Purba, B., 2025. Kajian Teori Pemikiran Adam Smith dan Relevansinya terhadap Perekonomian Masa Kini. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), 370–378. <https://doi.org/10.56672/smcjzk68>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah. 2024. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah Agustus 2024*. <https://sulteng.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah. 2025. *Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV-2024*. <https://sulteng.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/1338/pertumbuhan-ekonomi-sulawesi-tengah-triwulan-iv-2024.html>
- Becker, G. S., 1993. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, 3rd ed. University of Chicago Press.
- Blanchard, O., 2024. *Macroeconomics*, 9th ed. Pearson.
- Chirwa, T. G., Odhiambo, N. M., 2018. Exogenous and endogenous growth models: A critical review. *Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe*, 21(4), 63–84. DOI: [10.2478/ceer-2018-0027](https://doi.org/10.2478/ceer-2018-0027)
- Darmawan, A. S., Mifrahi, M. N., 2022. Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 111–118. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol1.iss1.art11>
- Fahrudin, (2024). Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Konsep, Indikator, dan Pendekatan Pengukuran. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(3), 1375–1384. DOI: [10.62976/ierj.v2i3.685](https://doi.org/10.62976/ierj.v2i3.685)
- Halim, A., 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hanipah, Sugiartini, P., Maula, I. M., 2023. Analysis of The Impact of Government Fiscal and Monetary Policies on Economic Growth In Indonesia: Government Economic Approach. *Journal Of Social Research*, 2(11), 3867–3871, DOI: [10.55324/josr.v2i11.1498](https://doi.org/10.55324/josr.v2i11.1498)
- Himmah, L., Chotimah, C., & Perdana, P. (2024). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Belanja Daerah dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Gerbangkertosusila. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 10(17), 462–471, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13896531>

- Marcal, I. A. F., Oentoro, Y. P., Yasin, M., 2024. Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 40–47. DOI: <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1898>
- Keynes, J. M., 2018. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-70344-2>
- Krugman, P., Wells, R., 2013. *Economics*, 3rd ed. Worth Publishers.
- Lestari, P. A., 2025. The Impact of Government Expenditure and Labor Force on Regional Economic Growth: Evidence from Kendari, Indonesia. *Sinergi International Journal of Economics*, 3(2), 119-131, DOI: [10.61194/economics.v3i2.749](https://doi.org/10.61194/economics.v3i2.749)
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Mahtura, D., Ichsan. 2026. The Influence of The Human Development Index, Open Unemployment Rate, and Inflation on Economic Growth In Indonesia. *Journal of Malikussaleh Public Economics*, 9(1), 13-26
- Mankiw, N. G., 2022. *Macroeconomics*, 11 Ed. Worth Publishers, Macmillan Learning
- Mardiasmo. 2021. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru, Andi.
- Maulid, L. C., Bawono, I. R., Sudibyoy, Y. A., 2021. The Effect of Government Expenditure on Economic Growth in Indonesia. *Ekulibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 24-38. <https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v16i1.3172>
- Nasution, M., 2019. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 4(2), 141–158. DOI: <https://doi.org/10.22212/jbudget.v4i2.80>
- Okun, A. M., 1962, Potential GNP and Its Measurement and Significance, American Statistical Association. *Proceedings of the Business and Economics Statistics Section*, Washington DC, 98-104.
- Pratiwi, N., 2022. Analisis Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017–2021. *Populer Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(4), 155-166, DOI: [10.58192/populer.v1i4.300](https://doi.org/10.58192/populer.v1i4.300)
- Purwanti, D., Nurhidayati, 2025. The Influence of Local Government Spending and Village Funds on Inclusive Economic Development in Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*. 10(1), 80-93, DOI: [10.33105/itrev.v10i1.843](https://doi.org/10.33105/itrev.v10i1.843)
- Putri, A. G., Rusdi, M., 2025. Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera. *Jurnal Darma Agung*, 33(1), 171–180. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v33i1.5376>
- Ridwan, Nawir, I. S., 2021. *Ekonomi Publik*. Pustaka Pelajar.
- Romer, P. M., 1994. The Origins of Endogenous Growth. *Journal of Economic Perspectives*, 8(1), 3–22. <https://doi.org/10.1257/jep.8.1.3>
- Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., Prasetyia, F., 2021. Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85–102. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339>
- Sari, W. F., Saputra, D., Yasmin, 2024, Analisis Kinerja Keuangan Bank BUMN dan Bank Swasta Indonesia: Studi Komparatif. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, 5(2), 271-285, DOI: [10.35912/simo.v5i2.3536](https://doi.org/10.35912/simo.v5i2.3536).
- Schultz, T. W., 1971. *Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research*. Free Press.
- Simanjuntak, G. Y., Yulika, M., Putri, D. N., Pangestoeti, W., 2025. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 260–273. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5158>
- Solikin, A., 2018, Pengeluaran Pemerintah dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis, *Jurnal Info Artha*, 2(1), 65-89, DOI: [10.31092/jia.v2i1.237](https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.237)
- Solow, R. M., 1956. A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94. <https://doi.org/10.2307/1884513>

Rezal*, Yunus Sading, Edhi Taqwa, Muhammad Akbar, Yohan: *Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020–2024*

- Stiglitz, J. E., Rosengard, J. K., 2015. *Economics of the Public Sector*, 4th ed. W. W. Norton
- Syakur, R. M., Reviane, I. T., Paddu, A. H., 2022. The Influence of Fiscal And Monetary Policy on Indonesia's Economic Growth Through Unemployment and Investment. *Journal of Economics Research*. 5(1), 20-31, DOI: [10.57178/jer.v5i1.241](https://doi.org/10.57178/jer.v5i1.241)
- Todaro, M. P., Smith, S. C., 2021. *Economic Development*, 13th ed. Pearson.
- Zahra, R. A., 2023. The Influence of Inflation and Unemployment on Economic Growth In Indonesia Period 2003–2022. *Jurnal Ekonomi*, 12(1). 1804-1813